

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pusat pertumbuhan memiliki arti fungsional dan geografis. Secara fungsional pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai lokasi yang terkonsentrasi terhadap kelompok usaha dengan keterkaitannya terhadap unsur kedinamisan yang dapat menstimulasi kehidupan ekonomi. Adapun secara geografis diartikan dengan lokasi yang memiliki beragam jenis fasilitas serta kemudahan akses sehingga menjadikan lokasi tersebut dengan nilai daya tarik tinggi (*pole of attraction*) yang memberikan dampak terhadap banyaknya usaha yang tertarik untuk mendirikan jenis usahanya pada daerah tersebut dan memanfaatkan fasilitas yang ada (Tarigan, 2005). Kriteria suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan adalah daerah tersebut merupakan daerah yang berkembang pesat dan mempunyai sejumlah sektor yang lebih banyak dibandingkan daerah tertinggal secara ekonomi maupun sektor lainnya (Emalia & Isti, 2018).

Penentuan pusat pertumbuhan memberikan dampak terhadap arah dan kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam pembangunan wilayah sehingga salah satu keberhasilan pembangunan nasional juga didukung oleh keberhasilan pembangunan daerah yang diatur oleh pemerintah daerah setempat (Nainggolan, 2012). Salah satu fungsi pusat pertumbuhan yaitu untuk pemerataan pembangunan di semua wilayah serta memudahkan koordinasi antar wilayah dalam memaksimalkan pengelolaan fasilitas serta pengembangan potensi sumber daya alam yang ada, sehingga penentuan pusat pertumbuhan di suatu wilayah sangat penting untuk dilakukan (Utomo & Putu, 2014). Penetapan pusat pertumbuhan di suatu wilayah merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar pembangunan dapat berfokus pada suatu wilayah dengan melengkapi fasilitas serta perbaikan terhadap infrastruktur yang memadai dan dapat juga melayani daerah belakang (*hinterland*). Infrastruktur serta fasilitas memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu wilayah, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan

kesenjangan antar wilayah. Pengembangan suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan jumlah serta jenis sarana pelayanan pada wilayah tersebut, semakin banyak jumlah sarana suatu wilayah maka menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin berkembang sehingga dampak dari peningkatan kebutuhan fasilitas yaitu terkonsentrasinya pemenuhan pelayanan fasilitas pada suatu wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, kesejahteraan penduduk serta menghindari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan sosial maupun ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan penduduk ke arah tengah atau pusat, karena wilayah tersebut akan menampung lebih banyak penduduk yang membutuhkan pelayanan lebih banyak sehingga perbedaan antar wilayah tersebut akan semakin besar (Hasan, 2017).

Perkembangan pusat pelayanan sangat bergantung pada jumlah penduduk yang melayani maupun yang dilayani. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menimbulkan adanya perbedaan dari aspek kebutuhan fasilitas pada tiap wilayahnya (Mauliana, Astuti, & Fadli, 2018). Pusat-pusat pelayanan adalah kumpulan dari beberapa kegiatan maupun aktivitas dari sarana prasarana yang dapat menunjang perkembangan wilayah (Soepono, 2012). Apabila dilihat segi ekonomi, penentuan pusat pertumbuhan memberikan manfaat positif terhadap wilayah *hinterland* dengan memusatkan pertumbuhan perekonomian pada wilayah tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa wilayah sekitarnya akan mendapatkan keuntungan serta dapat meningkatkan produksi di wilayah *hinterland* yang akan berdampak pada pembangunan wilayah.

Perkembangan suatu wilayah akan sangat berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayah, sumber daya alam, dan tenaga kerja yang ada pada wilayah tersebut. Pertambahan jumlah penduduk memberikan dampak yang signifikan terhadap kebutuhan ruang atau lahan untuk kegiatan sosial, ekonomi dan budaya (Hasan, 2017). Pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah tidak selamanya diikuti dengan pemerataan ekonomi maupun pendapatan. Permasalahan terbesar suatu daerah juga dipengaruhi oleh adanya ketimpangan pembangunan sehingga berakibat pada tingkat ketimpangan yang cukup lebar dalam jangka panjang

(Hasan, 2017). Pemenuhan fasilitas yang belum memadai dan banyaknya permasalahan terkait keterjangkauan fasilitas karena buruknya infrastruktur. Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi karena perbedaan sumberdaya alam maupun kondisi demografi yang terdapat pada tiap wilayah sehingga mendorong proses pembangunan yang berbeda pada tiap wilayah, sehingga pada tiap wilayah terdapat perbedaan berupa wilayah maju (*develop region*) maupun wilayah terbelakang (*undeveloped region*) (Sjafrizal, 2012).

Pembangunan infrastruktur berkualitas mampu mendorong peningkatan daya saing antar wilayah serta dapat memudahkan dalam mobilitas sehingga memberikan *multiplier effect* yang baik untuk kesejahteraan penduduk. Infrastruktur dapat diartikan sebagai bentuk fisik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan diantaranya kebutuhan sosial dan ekonomi, kebutuhan dasar seperti bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, fasilitas umum, transportasi, irigasi, maupun tempat limbah pembuangan dan sampah (Grigg, 1988). Infrastruktur yang memadai serta mudah dijangkau pada seluruh wilayah mendorong terwujudnya kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan. Minimnya ketersediaan infrastruktur, rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya kesempatan kerja merupakan faktor penghambat pertumbuhan wilayah (Saputra & Riyanto, 2023).

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sleman

Kabupaten/kota	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk %	
	2020	2023	2010-2020	2020-2023
Kulon Progo	436.395	443.053	1,12	1,75
Bantul	985.770	1.009.434	0,76	2,75
Gunungkidul	747.161	751.011	0,98	0,59
Sleman	1.125.804	1.157.292	0,29	3,2
Yogyakarta	373.589	375.699	0,38	0,68
DI. Yogyakarta	3.668.719	3.736.489	0,58	2,11

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2024

Strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan salah satunya dengan mentransformasikan daerah-daerah tertentu secara lebih luas menjadi pusat pertumbuhan secara menyebar sehingga interkoneksi antar pusat pertumbuhan dan daerah belakang (*hinterland*) dapat berkembang secara bersamaan (Rahayu & Eko, 2014). Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan jumlah penduduknya yang meningkat dari tahun ke tahun apabila dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota di sekitarnya. Pada Tabel 1.1 dilihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 1.125.804 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,29% dan pada tahun 2023 pertumbuhan jumlah penduduk meningkat menjadi 1.157.292 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,2%. Kabupaten Sleman memiliki 17 Kecamatan 86 Desa dan 1.212 Dusun dengan luas total wilayah sebesar 574,82 Ha. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya wilayah yang relatif datar, ketersediaan fasilitas umum, pusat pendidikan dan mobilitas penduduk yang tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi memungkinkan adanya resiko akibat tidak sebandingnya antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketersediaan jumlah sarana dan prasarana.

Permasalahan pengembangan wilayah terkait pusat pertumbuhan di Kabupaten Sleman umumnya disebabkan oleh letak geografis, luas wilayah serta jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan tidak meratanya persebaran fasilitas seperti sarana dan prasarana terutama pada wilayah yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan yang berada pada sisi utara Kabupaten Sleman dan jauh dari pusat kota. Wilayah Kabupaten Sleman yang cukup luas memungkinkan pembangunan hanya difokuskan pada wilayah yang memiliki kemudahan akses dan dapat dijangkau oleh masyarakat, hal tersebut mengakibatkan penduduk yang berasal dari wilayah lain datang dan memanfaatkan sarana pada daerah tersebut sehingga akan berdampak pada tingginya konsentrasi penduduk (Subkhi & Mardiansjah, 2019). Pengembangan terhadap sarana dan prasarana yang memadai memberikan dampak terhadap sektor-sektor terkait pada tiap wilayah seperti sektor industri dan perdagangan, sektor pariwisata, sektor pertanian dan sektor lainnya

sehingga dapat menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk hanya sekedar berkunjung maupun menetap di wilayah tersebut, selain itu juga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru, serta peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

Wilayah berkembang merupakan wilayah yang dapat lebih cepat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan, hal ini karena wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan akan mendorong wilayah lain yang berada di sekitarnya sehingga menyerap potensi yang ada pada wilayah sekitar (Saputra & Riyanto, 2023). Penentuan pusat pertumbuhan dalam hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan antar wilayah, sehingga pendekatan yang dilakukan memiliki konsep pengembangan daerah yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan pada ruang lingkup Kabupaten dengan tujuan agar terciptanya pemerataan pembangunan pada tiap-tiap Kecamatan (Karmila & Risma, 2022). Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dapat dikaitkan dengan kemampuan dalam peningkatan pelayanan publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas tempat ibadah dan transportasi penghubung antar wilayah yang merupakan penggerak dalam berbagai kegiatan pada setiap wilayah. Ketersediaan unit dan jenis fasilitas, jumlah keterhubungan, serta interaksi wilayah yang berbeda-beda pada tiap Kecamatan di Kabupaten Sleman dapat digunakan sebagai salah satu faktor untuk mengetahui wilayah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Sleman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis skalogram dan indeks sentralitas dengan parameter utama jumlah unit dan jenis fasilitas serta jumlah penduduk, analisis sentralitas berdasarkan *konig* dan *shimbel* dihitung menggunakan jumlah keterhubungan antar wilayah sehingga diketahui tingkat konektivitas antar wilayah, serta analisis gravitasi dihitung menggunakan jumlah penduduk dan jarak antar masing-masing wilayah sehingga diketahui kekuatan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (*hinterland*). Selanjutnya, hasil dari analisis tersebut akan ditentukan kesesuaian pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* berdasarkan dokumen Kebijakan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041. Berdasarkan dokumen kebijakan tersebut terdapat beberapa pusat pertumbuhan yang ditetapkan di Kabupaten Sleman diantaranya Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Penetapan pusat pertumbuhan tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah dan pihak terkait. Perlunya penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah terhadap penetapan pusat pertumbuhan di Kabupaten Sleman sudah sesuai atau belum sesuai, hal ini karena apabila penetapan tersebut tidak sesuai adanya maka juga akan berdampak pada rencana pembangunan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul **”Analisis Kecamatan Pusat Pertumbuhan dengan Wilayah *Hinterland* di Kabupaten Sleman Tahun 2023”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil diantaranya:

1. Bagaimana kedudukan Kecamatan yang berpeluang sebagai pusat pertumbuhan serta wilayah *hinterland* di Kabupaten Sleman Tahun 2023?
2. Bagaimana kekuatan interaksi Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan utama dengan wilayah *hinterland* di Kabupaten Sleman Tahun 2023?
3. Bagaimana kesesuaian pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan Kecamatan yang berpeluang sebagai pusat pertumbuhan serta wilayah *hinterland* di Kabupaten Sleman Tahun 2023.
2. Menganalisis kekuatan interaksi Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan utama dengan wilayah *hinterland* di Kabupaten Sleman Tahun 2023?

3. Menganalisis kesesuaian pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Sistem Informasi Geografis untuk penentuan pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* di Kabupaten Sleman serta kajian spasial terkait hirarki wilayah.

2. Manfaat Praktis

- a. Mahasiswa: penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lain selanjutnya.
- b. Masyarakat: penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi terkait ketersediaan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang berada pada Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dan Kecamatan yang menjadi wilayah *hinterland*.
- c. Pemerintah: penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana pengembangan serta penambahan kebutuhan agar tidak terjadinya kesenjangan antara wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterland*.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1 Pengertian Wilayah dan Pusat Pertumbuhan

Pengertian wilayah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kesatuan geografis yang didalamnya terdapat unsur yang berkaitan dengan aspek administratif dan fungsional. Ada beberapa ciri-ciri wilayah mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia dan struktur kelembagaan, dengan demikian dapat diketahui bahwa konsep wilayah merupakan interaksi antara manusia dengan sumberdaya dalam batas wilayah tertentu. Menurut Tarigan (2005) wilayah dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan, dalam hal ini dapat dibedakan atas:

1. Wilayah administratif yang memiliki batasan yang ditentukan oleh kepentingan administratif seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan.
2. Wilayah Homogen merupakan wilayah yang dicirikan memiliki aspek keseragaman baik dalam ekonomi, geografi, agama, suku dan lain sebagainya.
3. Wilayah Perencanaan merupakan wilayah berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi dengan penetapan pusat pertumbuhan (*growth center*) dan kemudian ditetapkan pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan tersebut.

Pusat pertumbuhan merupakan teori penggabungan antara prinsip konsentrasi dan desentralisasi untuk mencapai tujuan pembangunan regional dengan menyatukan kebijakan beserta dengan program pembangunan wilayah (Nandya, 2016). Pengertian pusat pertumbuhan secara fungsional merupakan bentuk dinamis suatu kelompok usaha yang dapat menstimulasi kehidupan perekonomian kedalam maupun keluar daerahnya (*hinterland*), sedangkan pengertian geografis pusat pertumbuhan merupakan lokasi dengan beragam fasilitas serta memiliki

tingkat daya tarik yang tinggi dan memiliki kemudahan jangkauan (Tarigan, 2005).

Ciri-ciri pusat pertumbuhan wilayah menurut (Tarigan,2005) diantaranya:

1. Terdapatnya hubungan *internal* antar kegiatan

Hubungan *internal* adalah hubungan yang terjadi antara satu sektor dengan sektor lainnya, oleh karena itu hubungan *internal* memegang peran penting dalam proses pembangunan suatu kota. Apabila ada sektor yang berkembang, maka akan mendorong pertumbuhan sektor lain dan akan menciptakan sinergi antar sektor.

2. Terdapatnya efek penggandaan (*Multiplier Effect*)

Terdapatnya berbagai sektor yang berkaitan satu sama lain dan menimbulkan efek penggandaan atau *multiplier effect*. *Multiplier effect* dapat diartikan apabila terjadi peningkatan permintaan pada suatu sektor, maka produksi juga akan meningkat karena adanya keterkaitan dengan sektor lain dan produksi juga akan meningkat karena berperan besar dalam pembangunan daerah yang melatarbelakangi terjadinya *multiplier effect*.

3. Adanya fokus geografis

Adanya fokus geografis sangat berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan daya tarik (*attractiveness*) sehingga sektor-sektor yang saling membutuhkan dapat menemukan kebutuhannya ditempat yang lebih dekat dan lebih menghemat waktu maupun biaya.

4. Mendorong daerah belakangnya

Pusat pertumbuhan dicirikan salah satunya adalah dapat mendorong wilayah belakangnya. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan suatu sektor yang juga dapat mendorong sektor yang berada di wilayah lain karena dalam hal ini membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya sehingga terjadinya hubungan harmonis dengan daerah di

belakangnya sehingga dapat memacu pertumbuhan daerah belakangnya.

Indikator wilayah dapat dikatakan sebagai suatu pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang paling cepat berkembang dengan beberapa parameter pendukung diantaranya kondisi struktur fisik wilayah, kekayaan sumber daya alam, infrastruktur yang lengkap, dan keberadaan sektor-sektor unggulan yang berinteraksi satu dengan yang lain pada wilayah *hinterland* (Tarigan, 2005).

1.5.1.2 Wilayah *Hinterland*

Wilayah *Hinterland* merupakan area suatu kota yang merupakan pusat pertumbuhan (*central place*) yang dominan di antara kota-kota lainnya (Blair, 1991). Penentuan wilayah *hinterland* dapat berupa kecamatan atau desa menurut jarak atau radius yang menghubungkan pusat produksi ekonomi dan jasa. Wilayah belakang merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayah pusat sehingga berperan besar dalam mendorong pembangunan (O'Sullivan, 1996). Menurut Yulianto (2015) *hinterland* merupakan suatu daerah administratif yang sulit dipisahkan dengan wilayah pusat akan tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda serta orientasi kehidupan masyarakat wilayah *hinterland* umumnya pada pertanian, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap daerah memiliki potensi untuk menjadi daerah pusat. Daerah *hinterland* merupakan daerah yang memiliki interaksi satu sama lain dengan daerah pusat yang saling berkaitan. Menurut Muta'ali (2015) fungsi daerah *hinterland* diantaranya:

1. Dalam interaksi antara desa dan kota, wilayah *hinterland* berperan menjadi wilayah pendukung maupun penyedia bahan makanan utama, seperti beras, jagung, ubi kayu, kacang, sayur-sayuran, dan daging.
2. Wilayah *hinterland* memiliki fungsi sebagai sumber bagi beberapa bahan mentah serta tenaga yang berorientasi pada sektor ekonomi.

3. Segi perspektif aktivitas pekerjaan, wilayah *hinterland* dapat menjadi desa agraris, manufaktur, industri, atau desa nelayan.

Namun selain pembangunan fisik, aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga harus diperhatikan. Hal ini dapat dicapai dengan menjalin hubungan interaktif yang aktif dengan beberapa daerah di sekitarnya serta kemudahan akses sehingga saling berpengaruh antara wilayah pusat dengan wilayah belakangnya (Pramono, 2016).

1.5.1.3 Konsep Kawasan Perkotaan dan Perdesaan (*Urban and Rural*)

Konsep hubungan perkotaan dan perdesaan memiliki perspektif yang berbeda. Perdesaan ditandai dengan ciri yang berorientasi pada pertanian, kepadatan penduduk rendah, pendidikan dan potensi tenaga kerja rendah, serta pola kehidupan yang tradisional dengan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis sistem yang sederhana atau primer. Sebaliknya daerah perkotaan ditandai dengan struktur masyarakat yang berorientasi pada perdagangan maupun jasa, memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan pola pemukiman penduduk berkelompok, potensi tenaga kerja dan pendidikan yang tinggi serta berorientasi pada sistem kerja yang kompleks dan formal (Davoudi, 2002). Perkotaan dikatakan sebagai pusat segala bentuk kegiatan baik pemerintahan, pusat kreativitas, pusat budaya yang memberikan dampak terhadap perkembangan hidup masyarakat yang memiliki perbedaan signifikan dengan perdesaan atau kawasan pinggiran (Suparmini, 2007).

Ciri serta pola kehidupan dari dua wilayah tersebut memiliki perbedaan akan tetapi perbedaan tersebut bukan berarti bahwa tingkat kesejahteraan antar dua wilayah tersebut berbeda pula. Akan tetapi apabila dilihat dari beberapa aspek masih terdapat perbedaan baik dari segi pelayanan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan sebagai contoh umumnya pada standar pelayanan terhadap kebutuhan dasar baik infrastruktur dan lainnya. Ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan kemampuan serta kesempatan yang diperoleh

antara masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Kecenderungan terjadinya ketidakseimbangan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya keseimbangan sumberdaya serta manajemen pembangunan dapat terhadap masyarakat desa dan kota, selain itu juga mendorong perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan serta peningkatan produksi dan produktivitas pada daerah perdesaan (Kakazu, 1994).

Umumnya permasalahan terkait daerah perkotaan dan perdesaan yakni berkaitan dengan kemiskinan, kualitas hidup, kurangnya sarana dan prasarana, serta masalah kompleks yang saling berkaitan. Menurut Suparmini (2007) adapun usaha yang dapat dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya:

a. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Pengembangan masyarakat diartikan sebagai usaha kelembagaan yang berupa program, metode maupun gerakan yang dilakukan dengan melatih partisipasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan secara bersama melalui program-program maupun sosialisasi bagi pihak-pihak terkait.

b. Pembangunan Desa Terpadu (PDT)

Pembangunan Desa Terpadu (PDT) merupakan pembangunan ini bertujuan sebagai peningkatan produksi, tingkat kualitas hidup serta peningkatan lembaga swadaya masyarakat. Adapun hal yang terpenting dalam PDT diantaranya pembangunan pertanian dengan tenaga kerja yang tinggi atau padat, menciptakan kesempatan kerja, pengelolaan terhadap industri kecil serta pengembangan hierarki perkotaan yang mendukung pembangunan perdesaan dan infrastruktur yang memadai.

c. Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pengembangan

Salah satu unsur pokok dari program Pembangunan Desa Terpadu (PDT) yaitu pada perkembangan wilayah. Hal ini berdasarkan dari struktur tata ruang wilayah yaitu terdapat suatu pusat wilayah yang memiliki pengaruh yang saling bergantung

secara fungsional sehingga memiliki pengaruh bagi pembangunan wilayah perdesaan serta terhadap pusat pelayanan dan permukiman penduduk.

d. Peningkatan Kemampuan Masyarakat Perdesaan

Upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan antara perkotaan dengan perdesaan secara khusus direalisasikan dalam beberapa kebijakan diantaranya dengan pendekatan melalui peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan serta upaya untuk memperkuat ekonomi dan perdesaan.

Konsep Kawasan Perkotaan dan Perdesaan (*Urban and Rural*) merupakan peralihan pemanfaatan lahan dan karakteristik sosial ekonomi penduduk antara perkotaan terbangun yang menyatu dengan permukiman perkotaan utamanya sebagai kawasan yang tidak dapat dipisahkan dari pusat dengan daerah belakang (*hinterland*). Secara fisik konsep kawasan perkotaan dan perdesaan (*urban and rural*) berkaitan langsung dengan pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland*. Wilayah perkotaan (*urban*) dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena merupakan kawasan pengembangan yang cukup pesat sehingga dapat mendorong wilayah disekitarnya. Pusat pertumbuhan dalam konsep perkotaan salah satunya memiliki peran menjadi pusat pelayanan baik dari segi sosial maupun ekonomi bagi wilayah sekitar.

Selain itu, wilayah *hinterland* merupakan wilayah yang dicirikan oleh kegiatan perdesaan (*rural*) yang bercampur dengan kegiatan perkotaan (*rural-urban*). Daerah *hinterland* dapat dicirikan bergantung pada lokasinya, hal ini karena pada setiap wilayah pinggiran memiliki karakteristik tersendiri. Perbedaan konsep wilayah perdesaan (*rural*) dengan wilayah *hinterland* terletak pada beberapa pertimbangan diantaranya seperti karakteristik demografis, ketersediaan layanan dan infrastruktur publik, sebagai contoh karakteristik demografis wilayah yaitu dari segi sosial masih terdapatnya kegiatan adat istiadat serta tradisi budaya yang kental, dari segi ekonomi masih terdapat ekonomi yang

belum sepenuhnya mampu atau belum sejahtera serta juga terdapat ekonomi yang sudah mulai menuju ekonomi sejahtera, serta apabila dilihat dari segi infrastruktur masih ada beberapa infrastruktur publik yang perlu diperhatikan diantaranya seperti jalan, drainase, penerangan umum, sarana pendidikan, serta sarana sosial dan ekonomi.

1.5.1.4 Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas

Analisis skalogram adalah metode untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan yang dilihat melalui ketersediaan fasilitas, analisis ini digunakan untuk penentuan hirarki pusat-pusat pertumbuhan serta jenis dan unit pelayanan yang terdapat pada suatu wilayah (Rondinelli, 1985). Secara umum, penentuan wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan melalui hirarki wilayah terdapat metode analisis selain skalogram diantaranya metode *Christaller, Rank Size Regular* dan metode *Zipf*. Namun, dalam praktiknya metode tersebut dianggap kurang akurat karena hanya menggunakan satu variabel dalam analisisnya yaitu jumlah penduduk, wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi akan menempati hirarki tertinggi dan seterusnya (Tarigan, 2005).

Wilayah yang memiliki kelengkapan jenis dan unit fasilitas lengkap cenderung menjadi pusat pelayanan sedangkan wilayah dengan jenis dan unit fasilitas kurang lengkap menjadi daerah belakang. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui jenis dan unit fasilitas yang dimiliki suatu daerah sebagai pendukung indikator terhadap pusat pertumbuhan. Tujuannya untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan yang ada berdasarkan dengan fasilitas yang tersedia.

Menurut Muta'ali (2015) Analisis skalogram dapat diklasifikasikan berdasarkan komponen fasilitas dasar diantaranya:

- a. Perbedaan (*differentiation*) merupakan fasilitas dengan kaitannya berdasarkan faktor ekonomi. Adanya perbedaan (*differentiation*) menandakan bahwa terdapatnya struktur kegiatan ekonomi yang kompleks sehingga memungkinkan untuk menarik minat penduduk

untuk tinggal dan bekerja di sana.

- b. Solidaritas (*solidarity*) merupakan fasilitas dengan kaitannya berdasarkan faktor sosial. Hal ini mencerminkan adanya tingkatan kegiatan sosial di suatu wilayah atau kota. Solidaritas (*solidarity*) meskipun tidak semua fasilitas berhubungan langsung dengan kegiatan sosial akan tetapi pengelompokannya masih mungkin dilakukan fungsi sosialnya yang lebih dominan apabila dibandingkan dengan orientasi keuntungan.
- c. Sentralitas (*centrality*) merupakan fasilitas dengan kaitannya berdasarkan faktor politik, ekonomi maupun pemerintahan. Hal ini mencerminkan hubungan masyarakat dalam suatu sistem kota atau wilayah. Sentralitas dapat dilihat melalui perkembangan hirarki dari institusi sipil seperti sekolah, kantor pemerintahan, rumah sakit dan lain sebagainya.

Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan adanya perbedaan (*differentiation*) dan sentralitas (*centrality*) wilayah. Semakin banyak dan beragam jenis fasilitas yang dimiliki pada suatu wilayah maka semakin tinggi kecenderungan pemusatan aktivitas sehingga wilayah tersebut berpotensi sebagai pusat pertumbuhan (Muta'ali, 2015). Tujuan dari penetapan orde perkotaan adalah untuk memperkirakan luas wilayah pengaruh dari kota tersebut, hal ini bertujuan agar dapat memperkirakan jenis, tingkat dan mutu fasilitas sesuai kepentingan umum pada wilayah tersebut baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk daerah belakang yang sering datang ke wilayah tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal (Tarigan, 2005).

Analisis skalogram memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara jumlah penduduk dengan fasilitas sosial ekonomi. Analisis ini dapat memberikan tingkatan perkembangan suatu daerah guna untuk perencanaan struktur ruang dan pusat pertumbuhan. Kelemahan analisis skalogram terletak pada distribusi nilai akhir yang tidak mempertimbangkan bobot serta jenis fasilitas, akibatnya terdapat

perbedaan antara rentang nilai sehingga sulit untuk dilakukan klasifikasi menjadi hirarki wilayah. Kelemahan dari analisis skalogram dapat diatasi dengan menggunakan analisis indeks sentralitas yang merupakan lanjutan dari analisis skalogram. Analisis ini bertujuan memahami struktur hirarki pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan dengan melibatkan jumlah serta jenis fungsi dan keberadaan fungsi dalam suatu wilayah, sehingga dapat dikatakan bahwa analisis indeks sentralitas lebih lengkap dan terperinci dalam mengevaluasi struktur dan fungsi wilayah (Muta'ali, 2015).

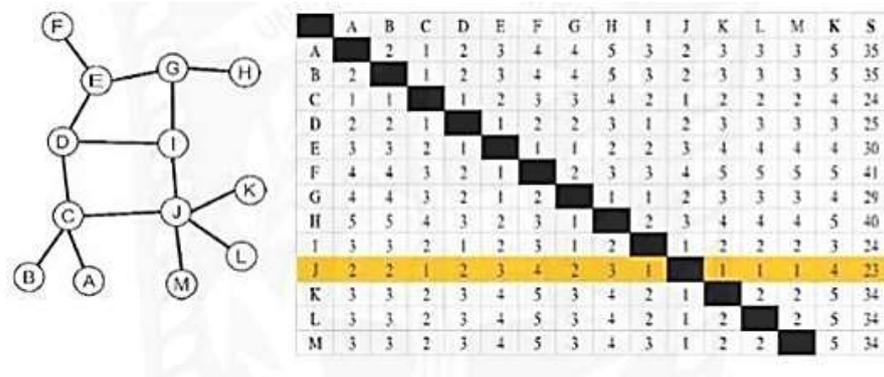
Analisis indeks sentralitas merupakan lanjutan dari analisis skalogram yang diukur dengan jumlah bobot yang dimiliki. Bobot yang semakin besar menunjukkan hirarki yang lebih tinggi (Kasikoen, 2019). Kelebihan dari analisis indeks sentralitas adalah analisis ini menghitung kelayakan berdasarkan jumlah orde pada suatu kawasan dengan rentang *interval* tertentu serta diketahui pengaruhnya terhadap pusat pertumbuhan, sedangkan kelemahan analisis ini hanya mengukur pengaruh pusat pertumbuhan berdasarkan kelengkapan sarana (Umar dkk., 2021). Analisis skalogram dan indeks sentralitas menunjukkan bahwa wilayah dengan hirarki yang tinggi merupakan kecamatan dengan jumlah dan jenis ketersediaan fasilitas yang sudah sebanding dengan jumlah penduduknya, sedangkan wilayah dengan hirarki yang rendah ditentukan dari sedikitnya jumlah dan jenis ketersediaan fasilitas yang belum sebanding dengan jumlah penduduknya.

1.5.1.5 Analisis *Konig* dan *Shimbel*

Indeks sentralitas antar wilayah dapat diukur dengan menggunakan tingkat konektivitas antar wilayah berdasarkan dengan kemudahan akses untuk mencapai suatu wilayah tersebut. Menurut Muta'ali (2015) tingkat konektivitas dapat diukur dengan:

- a. *Konig* (K) merupakan jumlah maksimal penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

- b. *Shimbel* (S) merupakan total penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya.



Gambar 1.1 Ilustrasi *Konig* dan *Shimbel*

Sumber: Nandya, 2016

Dilihat pada Gambar 3.1 ilustrasi *konig* dan *shimbel* bahwa semakin rendah nilai *konig* dan *shimbel* maka semakin strategis suatu wilayah sehingga tingkat perkembangan wilayah tersebut tinggi dan dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan (Muta'ali, 2015).

1.5.1.6 Teori Model Gravitasi

Teori gravitasi berguna untuk mengetahui besaran interaksi wilayah dengan asumsi penduduk sebagai massanya dan besarnya kekuatan interaksi dapat diukur dari tingkat perpindahan antar dua wilayah, perpindahan tersebut dapat berupa perpindahan barang, jasa atau informasi (Hasan, 2017).

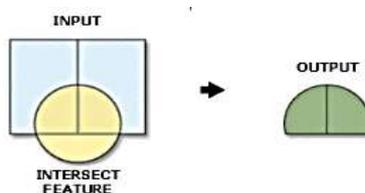
Model gravitasi *Newton* yang diterapkan oleh W.J. Reilly (1929) diukur dengan menggunakan nilai interaksi antar wilayah yang mempertimbangkan faktor jumlah penduduk serta jarak antar dua wilayah (Nandya, 2016). Model gravitasi digunakan untuk penentuan pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland*. Model ini membantu dalam mengidentifikasi nilai interaksi antar Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan Kecamatan yang berfungsi sebagai wilayah *hinterland* atau daerah belakang. Model ini merupakan salah satu model

untuk mengetahui tingkat daya tarik serta dapat mengetahui letak strategis dari suatu wilayah yang berpengaruh terhadap potensi suatu wilayah (Shara, 2018).

1.5.1.7 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem informasi geografi (SIG) adalah komponen sistem untuk mengolah data dalam bentuk spasial yang memiliki referensi geografi yang berfungsi untuk pemetaan dan perencanaan (Burrough, 1986). Sistem informasi geografis dapat menampilkan data dalam bentuk spasial berupa area, titik dan garis. Format data yang terdapat pada sistem informasi geografis (SIG) yaitu data vektor dan data raster. Data yang digunakan memberikan makna ketepatan terhadap analisis spasial. Data raster disusun dari *pixel-pixel* yang berguna untuk mengidentifikasi informasi dalam bentuk nilai (Prahasta, 2001). Data raster umumnya didapatkan dari perekaman citra satelit penginderaan jauh berupa foto udara yang hasilnya berupa nilai perekaman. Kelebihan analisis SIG terletak pada *tools overlay*. *Overlay* adalah suatu metode penggabungan dua data spasial yang berbeda atau lebih menjadi satu kesatuan data sehingga dapat diperoleh informasi yang utuh dari data tersebut. Menurut ESRI (2024) *Overlay* terdiri dari:

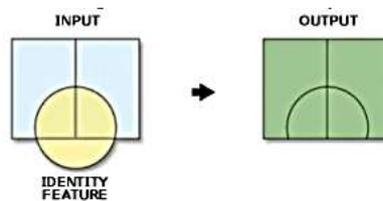
- a. *Intersect* adalah salah satu metode *overlay* dengan tampilan objek mengikuti ukuran terkecil pada objek dan area lain diluar objek akan dibuang.



Gambar 1.2 Tahapan *Intersect* Data

Sumber: ESRI, Tahun 2011

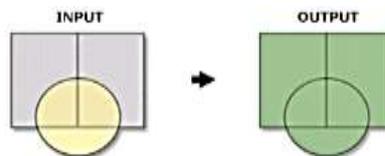
- b. *Identity* adalah salah satu metode *overlay* dengan menampalkan kedua objek mengikuti luasan objek acuan, dan area lain di luar objek akan dibuang.



Gambar 1.3 Tahapan *Identity* Data

Sumber: ESRI, Tahun 2011

- c. *Union* adalah salah satu metode *overlay* dengan menampalkan dua data tanpa adanya penghilangan objek pada area yang tidak bertampalan.



Gambar 1.4 Tahapan *Union* Data

Sumber: ESRI, Tahun 2011

1.5.1.8 Dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.13 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, terdapat beberapa kebijakan dengan tujuan:

1. Arahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah berdaya guna serta berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan sehingga perlu ada pengaturan ruang wilayah;
2. Pemanfaatan ruang agar merumuskan dengan ditetapkan struktur serta pola ruang sebagai strategi dalam RTRW.

Dalam pengembangannya, sistem pelayanan wilayah di Kabupaten Sleman terbagi atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan yang dikembangkan untuk fungsi pendidikan, perdagangan maupun jasa dalam ruang lingkup atau skala nasional. Kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diantaranya:
 - a) Kecamatan Depok diantaranya:
 - Kelurahan Maguwoharjo
 - Kelurahan Condongcatur
 - Kelurahan Caturtunggal
 - b) Kecamatan Ngaglik diantaranya:
 - Kelurahan Sariharjo
 - Kelurahan Sinduharjo
 - Kelurahan Minomartani
 - c) Kecamatan Mlati diantaranya:
 - Kelurahan Sendangadi
 - Kelurahan Sinduadi
 - d) Kecamatan Godean yaitu Kelurahan Sidoarum;
 - e) Kecamatan Gamping diantaranya:
 - Kelurahan Trihanggo
 - Kelurahan Nogotirto
 - Kelurahan Banyuraden
 - Kelurahan Ambarketawang
 - f) Kecamatan Ngemplak diantaranya Kelurahan Wedomartani.
 - g) Kecamatan Kalasan diantaranya Kelurahan Purwomartani.
 - h) Kecamatan Berbah yang meliputi:
 - Kelurahan Kalitirto
 - Kelurahan Tegaltirto
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan yang dikembangkan untuk fungsi pusat pemerintah dan pusat pengembangan kebudayaan

dalam ruang lingkup atau skala Kota atau Kabupaten yaitu Kecamatan Sleman diantaranya:

- Kelurahan Tridadi
- Kelurahan Triharjo
- Kelurahan Pandowoharjo
- Kelurahan Caturharjo

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan yang dikembangkan untuk fungsi sebagai pusat sarana perdagangan lokal dan sarana pariwisata dalam ruang lingkup atau skala Kabupaten atau Kota dan beberapa Kecamatan diantaranya:

a) Kecamatan Prambanan diantaranya:

- Kelurahan Bokoharjo
- Kelurahan Tamanmartani
- Kelurahan Tirtomartani

b) Kecamatan Godean diantaranya:

- Kelurahan Sidoagung
- Kelurahan Sidoluhur
- Kelurahan Sidokarto
- Kelurahan Sidomoyo
- Kelurahan Margoluwih

c) Kecamatan Pakem diantaranya:

- Kelurahan Pakembinangun
- Kelurahan Harjobinangun
- Kelurahan Umbulmartani

d) Kecamatan Tempel diantaranya:

- Kelurahan Lumbungrejo
- Kelurahan Merdikorejo
- Kelurahan Margorejo
- Kelurahan Mororejo

4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan kawasan yang

dikembangkan untuk fungsi untuk melayani kegiatan dalam ruang lingkup atau skala Kecamatan maupun beberapa desa diantaranya:

- a) Kecamatan Minggir 1 diantaranya Kelurahan Sendangagung.
- b) Kecamatan Minggir 2 diantaranya:
 - Kelurahan Sendangsari
 - Kelurahan Sendangrejo
 - Kelurahan Margokaton
- c) Kecamatan Moyudan diantaranya:
 - Kelurahan Sumberagung
 - Kelurahan Sendangarum
- d) Kecamatan Mlati diantaranya:
 - Kelurahan Tlogoadi
 - Kelurahan Sumberadi
 - Kelurahan Tirtoadi
- e) Kecamatan Seyegan diantaranya:
 - Kelurahan Margodadi
 - Kelurahan Margomulyo
- f) Kecamatan Gamping diantaranya Kelurahan Balecatur.
- g) Kecamatan Tempel diantaranya:
 - Kelurahan Sumberrejo
 - Kelurahan Tambakrejo
 - Kelurahan Banyurejo
- h) Kecamatan Turi diantaranya:
 - Kelurahan Donokerto
 - Kelurahan Wonokerto
 - Kelurahan Bangunkerto
- i) Kecamatan Ngaglik diantaranya:
 - Kelurahan Sandonoharjo
 - Kelurahan Sukoharjo
 - Kelurahan Umbulmartani
 - Kelurahan Harjobinangun

- j) Kecamatan Cangkringan diantaranya Kelurahan Argomulyo.
- k) Kecamatan Ngemplak diantaranya Kelurahan Widodomartani.
- l) Kecamatan Prambanan diantaranya:
 - Kelurahan Bokoharjo
 - Kelurahan Madurejo
- m) Kapanewon Berbah diantaranya:
 - Kelurahan Sendangtirto
 - Kelurahan Tegaltirto
 - Kelurahan Kalitirto

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai analisis kecamatan pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun terdapat perbedaan antara peneliti satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari beberapa aspek seperti hasil perolehan, metode yang digunakan, lokasi kajian dan data yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Eta Rahayu dan Eko Budi Santoso (2014) dengan judul penelitian “Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunungkidul”. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah waktu penelitian serta kajian penelitian dimana penulis mengambil waktu penelitian tahun 2023 di Kabupaten Sleman, sementara penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda dengan penulis yaitu dengan menggunakan analisis skalogram dan tipologi klassen yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Unggul Priyadi dan Eko Atmadji (2017) telah melakukan penelitian dengan judul penelitian “Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland* di Provinsi DIY”. Perbedaan peneliti dengan penulis adalah dalam dengan analisis konsentrasi geografi. Analisis konsentrasi geografi digunakan untuk mengukur tingkat persebaran fasilitas pertumbuhan ekonomi sedangkan dalam penelitian penulis hanya mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas, analisis gravitasi. Daerah kajian penelitian dalam

penelitian ini juga berbeda dengan penulis yaitu mengambil daerah kajian Provinsi DIY sedangkan pada penulis hanya mengambil daerah kajian spesifik yaitu Kabupaten Sleman dengan penentuan pusat pertumbuhan pada tiap Kecamatan.

Isti Farida (2017) telah melakukan penelitian dengan judul penelitian “Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung”. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu kajian wilayahnya dimana penulis menggunakan Kabupaten Sleman sementara Isti Farida menggunakan Provinsi Lampung untuk penelitiannya. Perbedaan lain juga terdapat pada metode yang digunakan dimana pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daerah cepat tumbuh dengan menggunakan faktor ekonomi dari analisis tipologi klassen.

Mayang Sari (2021) telah melakukan penelitian dengan judul penelitian “Kajian Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland* di Kabupaten Siak”. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu metode analisis sentralitas berdasarkan dengan nilai *konig* dan *shimbel*, selain itu wilayah penelitian yang berbeda dimana penulis menggunakan Kabupaten Sleman sementara Mayang Sari menggunakan Provinsi Lampung untuk penelitiannya.

Novyanto Panji Asmara dan Yesi Aprianti (2023) telah melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland* di Kota Samarinda” Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penentuan pusat pertumbuhan hanya berdasarkan indeks sentralis dan interaksi spasialnya, pada penelitian yang dilakukan penulis dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten atau Kota wilayahnya, dalam hal ini untuk mengetahui kesesuaian pusat pertumbuhan Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota.

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian yang akan dilakukan dengan Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Eta Rahayu & Eko Budi Santoso (2014)	Penentuan Pusat- Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunungkidul	Menentukan Kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarananya Menganalisa calon lokasi yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pertumbuhan ekonomi	Analisis Skalogram Tipologi Klassen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, ada 3 Kecamatan yang tidak layak berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Purwosari. Kecamatan yang berkembang cepat berdasarkan pertumbuhan ekonomi terdiri dari 4 Kecamatan diantaranya Kecamatan Semanu, Kecamatan Playen dan Kecamatan Karangmojo
2.	Unggul Priyadi & Eko	Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah	Menganalisis kesesuaian penetapan RTRW DIY sebagai pusat	Analisis Konsentrasi Geografi	Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa sarana-sarana yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di 5 Kabupaten/Kota

	Atmadji (2017)	<i>Hinterland</i> di Provinsi DIY	pertumbuhan ekonomi di DIY Menganalisis tingkat persebaran geografis ketersediaan fasilitas publik pada masing- masing daerah di DIY	Analisis Skalogram Analisis Gravitasi	di DIY telah terdistribusi merata. Terdapat 4 Kabupaten menurut RTRW DIY menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta dan wilayah <i>hinterland</i> adalah Kabupaten Kulonprogo.
3.	Isti Farida (2017)	Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung	Mengetahui daerah mana yang cepat maju dan tumbuh di Provinsi Lampung Mengetahui Kabupaten/Kota yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung Mengetahui Kabupaten/Kota yang	Analisis Skalogram Analisis Gravitasi Analisis Tipologi Klassen	Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan termasuk daerah cepat maju dan tumbuh serta merupakan pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung memiliki interaksi spasial yang

			memiliki nilai interaksi spasial yang tinggi dengan wilayah pusat pertumbuhan		tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan
4.	Mayang Sari (2021)	Kajian Pertumbuhan dan Wilayah <i>Hinterland</i> di Kabupaten Siak	Mengidentifikasi Kecamatan-Kecamatan yang berpeluang sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah <i>hinterland</i> Menganalisis kesesuaian pusat pertumbuhan dan wilayah <i>hinterland</i> dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak	Analisis Skalogram Indeks Sentralitas Analisis <i>Konig</i> dan <i>Shimbel</i> Analisis Gravitasi	Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa terdapat 9 Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan. Berdasarkan indeks sentralitas <i>konig shimbel</i> diketahui bahwa tingkat konektivitas tertinggi yaitu berada pada Kecamatan Mempura. Pusat pertumbuhan yang memiliki nilai interaksi terbesar terhadap wilayah belakangnya adalah Kecamatan Tualang.
5.	Novyanto Panji	Analisis Pusat Pertumbuhan dan	Menentukan Kecamatan yang	Analisis Skalogram	Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa terdapat 3

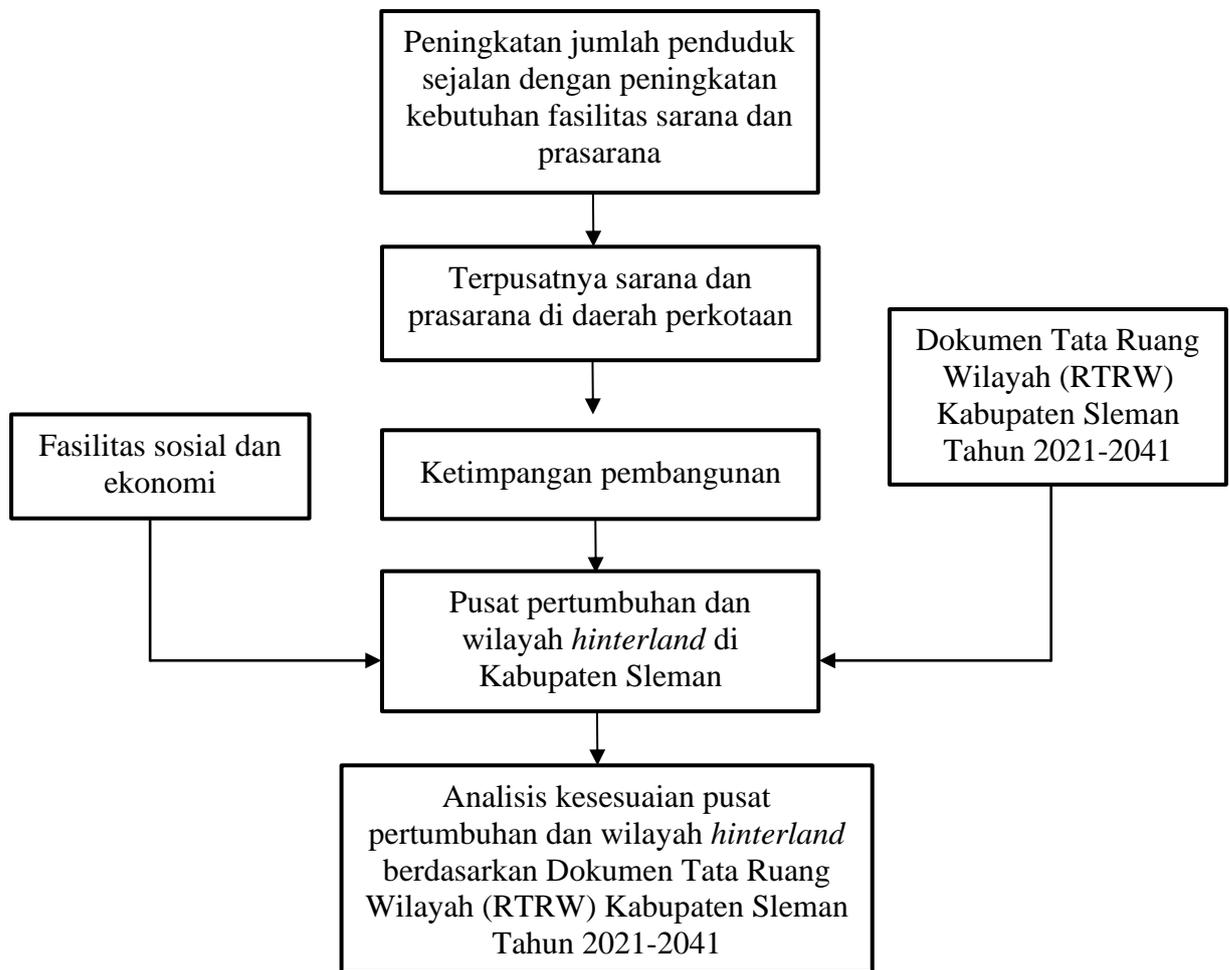
	Asmara & Yesi Aprianti (2023)	Wilayah <i>Hinterland</i> di Kota Samarinda	menjadi pusat pertumbuhan di Kota Samarinda tahun 2021 Menganalisis Kecamatan yang menjadi wilayah <i>hinterland</i> terhadap pusat pertumbuhan yang ada di Kota Samarinda tahun 2021	Analisis Indeks Sentralitas Analisis Gravitasi	Kecamatan yang berada pada hirarki 1 atau pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara. Kecamatan Samarinda memiliki interaksi terkuat dengan daerah <i>hinterlandnya</i> yaitu Kecamatan Samarinda Ulu.
--	--	---	--	--	--

Sumber: Analisis Penelitian Terdahulu oleh Peneliti, 2024

1.6 Kerangka Penelitian

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu daya tariknya yaitu pada fasilitas pendidikan dengan kualitas yang terbaik sehingga memberikan daya tarik bagi masyarakat yang berasal dari luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk datang dan menetap di wilayah tersebut. Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengakibatkan tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana. Banyaknya permasalahan terkait persebaran fasilitas yang tidak merata serta kelengkapan fasilitas yang dimiliki pada suatu wilayah juga dapat menyebabkan kesenjangan kebutuhan antar wilayah. Oleh karena itu, penentuan pusat pertumbuhan yang sesuai diharapkan dapat mencegah kesenjangan kebutuhan antar wilayah dan dapat mendukung perkembangan wilayah serta dapat mempermudah dalam mengakses sarana dan prasarana.

Penelitian penentuan pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* di Kabupaten Sleman dilakukan dengan menggunakan metode analisis skalogram dan indeks sentralitas, analisis indeks sentralitas berdasarkan *konig* dan *shimbel*, analisis gravitasi yang mengacu pada potensi dan kondisi wilayah dalam pengembangan sistem perkotaan berdasarkan dokumen Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka penelitian dalam penelitian “Analisis Kecamatan Pusat Pertumbuhan dengan Wilayah *Hinterland* di Kabupaten Sleman Tahun 2023” dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut ini:



Sumber: Analisis Penelitian Terdahulu oleh Peneliti, 2024

Gambar 1.5 Kerangka Penelitian

1.7 Batasan Operasional

Pusat Pertumbuhan adalah suatu lokasi dengan beragam fasilitas dan kemudahan jangkauan yang menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi pada daerah tersebut dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada (Tarigan, 2005).

Wilayah *Hinterland* adalah daerah administratif yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah pusat dan memiliki karakteristik berbeda serta berorientasi pada kehidupan masyarakat pertanian, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap daerah memiliki potensi untuk menjadi daerah pusat (Yulianto, 2015)

Analisis Skalogram adalah metode untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas, analisis skalogram dapat menentukan hirarki pusat-pusat pertumbuhan serta aktivitas pelayanan yang ada pada suatu wilayah (Rondinelli,1985).

Indeks Sentralitas adalah lanjutan dari analisis skalogram. Analisis ini memahami struktur hirarki pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan dengan melibatkan jumlah serta jenis fungsi dan keberadaan fungsi dalam suatu wilayah (Rondinelli,1985).

Analisis *Konig dan Shimbel* adalah metode penentuan indeks sentralitas antar wilayah yang diukur dengan menggunakan tingkat konektivitas antar wilayah berdasarkan dengan kemudahan akses untuk mencapai suatu wilayah tersebut (Muta'ali, 2015).

Analisis Gravitasi adalah metode untuk mengetahui keterkaitan atau interaksi antara kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan yang berfungsi sebagai wilayah *hinterland* (Nandya, 2016).

Sistem Informasi Geografis Sistem informasi geografi (SIG) merupakan komponen sistem yang digunakan untuk mengolah data spasial yang memiliki referensi keruangan yang berfungsi untuk pemetaan dan perencanaan (Burrough, 1986).